

ANNUAL REPORT



#SekarangSaatnya
Indonesia
#EndTB
dengan
#TOSSTBC

STOP TB PARTNERSHIP INDONESIA
KEMITRAAN MENUJU INDONESIA BEBAS TUBERKULOSIS

2019



Stop TB
Partnership
Indonesia



**#SekarangSaatnya
Indonesia
#ENDTB
dengan
#TOSSTBC**



ANNUAL REPORT 2019

STOP TB PARTNERSHIP INDONESIA
KEMITRAAN MENUJU INDONESIA BEBAS TUBERKULOSIS



DAFTAR AKRONIM

AJI	Aliansi Jurnalis Independen
CISDI	Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FSTPI	Forum Stop TB Partnership Indonesia
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAST	Partnership Actions to Stop Tuberculosis
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKM	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
PPCP	Public Private Community Partnership
PPTI	Perkumpulan Pemberantas Tuberculosis Indonesia
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SOP	Standar Operasional Prosedur
SDGs	Sustainable Development Goals
STPI	Stop TB Partnership Indonesia
TBC	Tuberculosis
USAID TBPS	United States Agency for International Development TB Private Sector

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Tentang STPI	02
Anggota Dewan dan Tim Eksekutif	03
Pendahuluan	04
Isu Strategis	06
Pendekatan	07
Potret Hasil Program 2019	08
Overview Kegiatan 2019	09
Advokasi Kebijakan Multisektor	11
Komunikasi Publik	18
Manajemen Organisasi	20
Alokasi Anggaran	21
Tantangan dan Pembelajaran	22
Best Practice - Cerita Perubahan Nasional dan Daerah	24
Ilyasi: Kader TBC Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	25
Ada Anggaran Program TBC dalam Anggaran Desa di Kabupaten Lombok Barat	27
Pesantren Siaga TBC	30
Difasilitasi STPI, Lombok Barat Kini Miliki Forum Kemitraan TBC	33
Inisiatif Pelibatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Penanggulangan Tuberkulosis	35

KATA PENGANTAR

Didirikan sejak tahun 2013, Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) telah memfasilitasi berbagai diskusi, kegiatan dan kolaborasi bersama mitra- mitra. Pada tahun kelima perjalanan STPI ini, kami mengambil langkah berani untuk akhirnya menjadikan STPI sebuah yayasan dengan badan hukum legal. Bila sebelumnya berbentuk forum untuk memfasilitasi diskusi, kini kami memiliki visi dan misi strategis yang diturunkan ke rencana kerja yang jelas dan nyata.

Perubahan dan langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang dan menyeluruh terutama dengan fakta bahwa urgensi eliminasi TBC di Indonesia semakin meningkat karena beban semakin bertambah dan upaya yang dilakukan belumlah cukup. Berangkat dari semangat kontribusi tersebut, STPI bertransformasi untuk mendorong pelibatan dan kemitraan lebih banyak aktor, terutama dari pihak-pihak yang belum terlibat selama ini.

STPI yang berjalan kini diharapkan menjadi angin segar perubahan dengan membawa inovasi dan pendekatan yang baru untuk memaksimalkan peran dan kontribusi STPI menuju Indonesia eliminasi TBC yang ditargetkan pada tahun 2030.

Laporan ini memaparkan berbagai kegiatan dan kerja yang telah dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas STPI kepada masyarakat Indonesia. Diharapkan agar pembaca dapat mengetahui langkah- langkah baru yang diambil oleh STPI baik untuk internal organisasi maupun memperkuat kemitraan dalam mengakhiri TBC.

HENY AKHMAD
DIREKTUR EKSEKUTIF

TENTANG STPI

Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) didirikan pada tanggal 30 Mei 2013 dan diketuai oleh Arifin Panigoro. Pada saat itu, tanpa badan hukum legal, Sekretariat FSTPI masih tergabung dengan Sekretariat Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). Salah satu bentuk kegiatan utama saat itu adalah forum komunikasi antara mitra-mitra STPI yang menjadi suatu wadah bagi berbagai organisasi maupun perorangan yang secara bersama-sama sepakat untuk membantu mengatasi masalah TBC. Forum tersebut menjadi wadah bagi para mitra yang peduli dan berupaya membantu penanggulangan TBC di Indonesia untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi. Pada tahun 2018, organisasi ini bertransformasi menjadi Stop TB Partnership Indonesia (STPI).

STPI merupakan organisasi nirlaba yang menjadi wadah kemitraan lintas sektor bagi organisasi dan individu yang berkomitmen mendukung Program Tuberkulosis Nasional menuju Indonesia Bebas TBC. Memahami tantangan yang harus dihadapi ke depan, maka STPI berupaya untuk mengembangkan diri secara organisasi baik internal maupun eksternal. Tahun ini, STPI telah resmi menjadi mitra Kementerian Kesehatan dan diharapkan mampu meningkatkan kemitraan strategis dalam penanggulangan TBC untuk mengatasi permasalahan yang timbul serta menjembatani peluang sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai eliminasi tuberkulosis.



ANGGOTA DEWAN DAN TIM EKSEKUTIF

ANGGOTA DEWAN



Ir. Arifin Panigoro
Pendiri Medco Energi Internasional



dr. Achmad Sujudi, SpB, MHA
Menteri Kesehatan RI (2000-2002) dan Ketua Badan Pengawas, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia



dr. Carmelia Basri, M.Epid
Ahli Penanggulangan Penyakit Menular Langsung dan Sistem Kesehatan dan Kepala Subdirektorat Tuberkulosis, Kementerian Kesehatan (2005-2008)



Dr. Esty Febriani, M.Kes
Penasihat Senior Project TB LKNU dan Co Founder Global Health Initiative Indonesia



William Slater
Direktur Kesehatan, USAID Indonesia



Amb. (ret) drs. Rizali W. Indrakesuma
Diplomat
(Duta Besar RI di India 2012-2017)



Diah Satyani Saminarsih
Penasihat Gender dan Kepemudaan
World Health Organizations



dr. Donald Pardede, MPPM
Ahli Pembiayaan Kesehatan dan Staf Khusus Kemenkes RI Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan (2018-2019)



Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K)
Spesialis Urologi dan Staf Khusus Kemenkes RI Bidang Peningkatan Pelayanan (2017-2019)



Dr. dr. Erlina Burhan, SpP(K)
Spesialis Paru



Anindita Sitepu, MSc
Dewan Penasihat Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives

TIM EKSEKUTIF

DIREKTUR EKSEKUTIF:

HENY AKHMAD



ADVOKASI & KOMUNIKASI

Manajer: **Thea Hutanamon**

Staf Komunikasi: **Diniati P. Yunitasari**

KEMITRAAN & TATA KELOLA

Manajer: **dr. Henry Diatmo**

Staf Program: **Bryan C ; Nuri Yani**

KEUANGAN & ADMINISTRASI

Manajer: **Yenny F. Yoris**

Staf Administrasi: **Prafitri Kumalasari**

PENDAHULUAN

Pada 24 Maret 2020 tepat 138 tahun bakteri tuberkulosis (TBC) ditemukan Robert Koch. Namun, merujuk Laporan Global Tuberkulosis 2019, belum ada negara yang terbebas dari penyakit menular ini. Badan Kesehatan Dunia memperkirakan setiap jam 96 orang jatuh sakit dan 11 orang meninggal akibat TBC di Indonesia. Adanya 845.000 kasus baru setiap tahun menempatkan Indonesia dalam peringkat ketiga negara beban TBC tertinggi di dunia. Empat puluh persen beban TBC dunia berada di Indonesia dan India.

Penyakit TBC berdampak pada visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Ciri kesehatan negara menengah ke atas adalah pergeseran tren beban penyakit dan penyebab kematian yang awal mulanya didominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular. Namun, penyakit tuberkulosis atau TBC belum bergeser dari daftar lima besar penyebab kematian di Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

Kondisi ini tentu akan menghambat pencapaian sejumlah target pembangunan kesehatan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2030 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Permasalahan TBC telah diakui menjadi permasalahan global dan masuk menjadi salah satu indikator di dalam SDGs, dimana secara politik momentum tersebut dideklarasikan secara resmi pada sidang umum PBB 26 September 2018. Hal tersebut juga menunjukkan pengakuan bahwa permasalahan TBC melampaui permasalahan kesehatan dan bahkan berdampak hingga ke aspek sosial dan ekonomi.





Lokakarya Penguatan Peran Multi-sektor Nasional Mengakhiri Tuberkulosis - 10 Desember 2019

Dalam konteks ini, pelibatan multi-pihak di luar sektor kesehatan diperlukan untuk menyelesaikan persoalan penyebaran penyakit dan infeksi TBC. Target nasional TBC adalah untuk mereduksi kasus TBC pada 2020 dan mengeliminasi TBC pada 2030 dimana insiden TBC menurun sampai 85% dan mortalitas menurun 90% dibandingkan tahun 2015. Sedangkan, untuk target jangka panjang diharapkan dapat tercapai eradikasi TBC pada tahun 2050.

Penyelesaian permasalahan TBC yang pantang surut membutuhkan gagasan-

gagasan baru. Besaran urusan TBC tidak hanya mencakup persoalan pasien tetapi juga menjaga populasi yang sehat. Eliminasi TBC 2030 diharapkan dapat tercapai melalui enam prinsip strategi program TBC nasional 2020-2024, yaitu melalui: (1) penguatan kepemimpinan pemerintah, (2) peningkatan akses layanan bermutu dan berpihak pada pasien, (3) optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, (4) pemanfaatan hasil riset dan teknologi, (5) peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor, serta (6) penguatan manajemen program melalui sistem kesehatan.

ISU STRATEGIS

Kemitraan Lintas Sektor & Multi-Pihak Untuk Mengakhiri Tuberkulosis



Kemandirian organisasi
masyarakat



Komitmen politis
pemerintah



Peran dan kontribusi
sektor swasta

STPI berkontribusi dalam eliminasi TBC melalui penguatan kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas di wilayah sasaran dengan dukungan kebijakan pusat dan daerah.

VISI

Indonesia bebas tuberkulosis melalui kemitraan yang kuat

MISI

1. Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional yang telah ditetapkan dengan inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas STPI
2. Mendorong harmonisasi program TBC secara lintas sektor, yang berlandaskan tata kelola yang akuntabel, transparan, dengan dampak terukur
3. Mendorong pelayanan TBC yang sesuai standar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TBC dan dalam mencari layanan kesehatan secara proaktif
4. Memobilisasi dukungan, sumber daya, dan upaya dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional melalui sebuah skema kemitraan untuk upaya pengendalian TBC di Indonesia
5. Mempengaruhi kebijakan terkait TBC melalui advokasi kepada pemangku kepentingan

PENDEKATAN

Setelah fokus pada pengembangan Forum menjadi Yayasan di tahun 2018, pada tahun keenam organisasi STPI mulai beroperasi dengan pengurus organisasi baru dan meningkatkan kontribusi dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia melalui pendekatan strategis sebagai berikut:

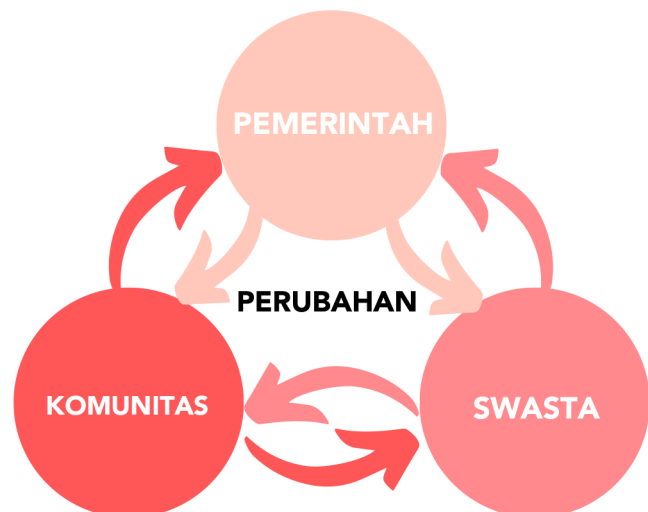
'Partnership Actions to Stop TB' (PAST):

Memberdayakan dan memperkuat kemitraan multisektor melalui advokasi kebijakan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai Indonesia Bebas TBC (eradikasi) pada tahun 2050.

SWASTA: Mendorong pelibatan dunia usaha dan mekanisme pembiayaan alternatif untuk meningkatkan dukungan bagi beragam inisiatif lokal dalam mengakhiri TBC

PEMERINTAH: Meningkatkan komitmen dan aksi politis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengimplementasikan dan mencapai target 'End TB 2030' sebagai sarana untuk mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta

KOMUNITAS: Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil lintas sektor dan komunitas terdampak TBC mengambil andil dalam pengendalian penyakit dan advokasi untuk pelayanan TBC yang berkualitas serta berpusat pada pasien.



PAST adalah model
"Public-Private-Community-Partnership"

Stop TB Partnership Indonesia bekerja dengan landasan bahwa perubahan dalam merespon epidemi TBC membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan dari 3 pihak: pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya, pemangku kepentingan sektor swasta, baik penyedia layanan kesehatan maupun perusahaan, serta masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dalam persiapan, perencanaan, dan pemantauan program TBC di tingkat nasional maupun daerah.

POTRET HASIL PROGRAM 2019

01.

Partisipan dalam kegiatan advokasi dan komunikasi pada 2019 berjumlah **401 orang**

02.

Partisipan yang terlibat dalam kegiatan pada program pilot STPI tahun 2019 di Kab. Sumenep dan Lombok Barat berjumlah **185 orang**

03.

Dokumen Komunike : Komitmen Bersama Peserta Pertemuan Tingkat Tinggi Lintas Sektor Nasional : Sinergi Multi-sektor untuk Mengakhiri Tuberkulosis

04.

Keterlibatan Komisi IX dan 2 anggota DPR RI 2020-2024 sebagai **anggota Global TB Caucus**

05.

Terbentuknya **Forum kemitraan TBC Lombok Barat** sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, pihak swasta dan elemen masyarakat dalam menjalankan upaya pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Lombok Barat

06.

9 Desa di Kabupaten Lombok Barat telah mengintegrasikan pencegahan dan pengendalian TBC dalam perencanaan pembangunan desa melalui mekanisme dana desa

07.

2 Pesantren di Kabupaten Sumenep (Annuqayah dan Al Karimiyah) telah Memiliki kader terlatih TBC dengan Kemampuan Skrining TBC dan pengelolaan pos kesehatan pesantren

08.

Skrining gejala TBC kepada **10.033** masyarakat pesantren di Kabupaten Sumenep

09.

Menerbitkan **SOP organisasi** untuk memperkuat kinerja organisasi

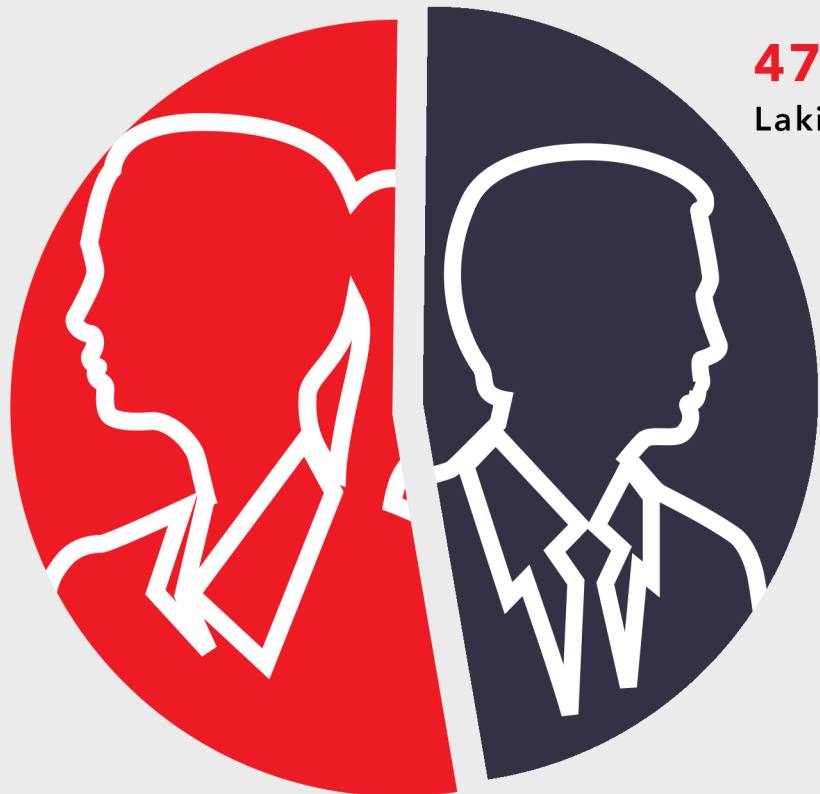
10.

Mendapatkan **pendanaan kegiatan** dari jejaring internasional dan nasional (PT. Aventis, USAID TBPS dan Stop TB Partnership)

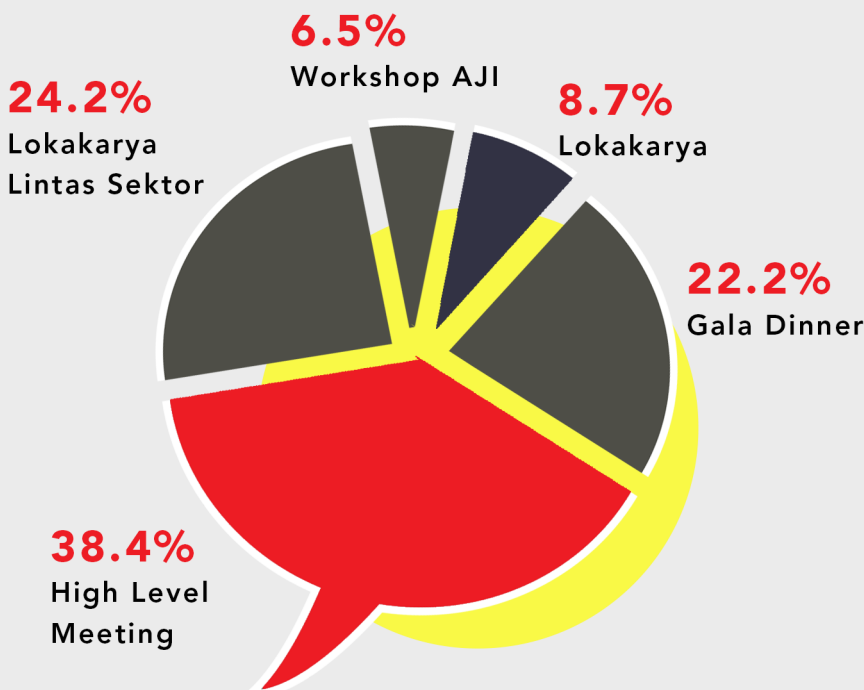
OVERVIEW KEGIATAN 2019

GENDER PESERTA KEGIATAN STPI

52.5%
Perempuan



47.5%
Laki-laki



PROPORSI PESERTA KEGIATAN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI STPI

KATEGORI INSTANSI PESERTA



29.8%

Pemerintah



18.5%

Mitra Internasional



15%

Organisasi Masyarakat



9.9%

Media



9.7%

Badan Usaha Swasta



4.8%

Organisasi Pasien



4.8%

Organisasi Keagamaan



3.2%

Organisasi Profesi



2.4%

Faskes Publik



0.8%

Organisasi Yankes



0.5%

Organisasi Kepemudaan



0.3%

Faskes Swasta

Klik pada kata yang digarisbawahi untuk baca lebih lanjut

OVERVIEW KEGIATAN 2019

ADVOKASI KEBIJAKAN MULTISEKTOR

PERTEMUAN 'GALA DINNER: A NIGHT IN UNITY'

STPI menyelenggarakan acara ini pada 3 Agustus 2019 di Soehanna Hall bersama Kementerian Kesehatan RI dan CISDI. Kegiatan ini berhasil mengundang lebih dari 100 pemangku kepentingan lintas sektor dan mempublikasikan bahwa TBC adalah masalah sosial, ekonomi, dan politis yang berpengaruh pada pembangunan nasional. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dunia usaha, kaum muda, duta besar, pemimpin dunia pembangunan dan kesehatan masyarakat, anggota DPR, Duta TBC yang mengekspresikan komitmen mereka untuk mendukung upaya mengakhiri TBC di Indonesia. Pertemuan ini berhasil memperkuat jejaring STPI untuk melakukan advokasi multisektor.

Pasca kegiatan Gala Dinner, komunikasi TBC dengan Komisi IX dan Kementrian Dalam Negeri semakin lancar dan mengalami kemudahan. Hal ini menjadi modal bagi STPI dalam upaya advokasi pencegahan dan pengendalian TBC di Indonesia.



AUDIENSI KE PRESIDEN RI BERSAMA STOP TB PARTNERSHIP

Pada 9 Desember 2019, STPI bersama Stop TB Partnership, PPTI dan CISDI berhasil menyampaikan urgensi



LOKAKARYA Penguatan Peran Multisektor Nasional untuk Mengakhiri Tuberkulosis

Pada 10 Desember 2019, STPI bersama Kemenkes RI, USAID Indonesia didukung Stop TB Partnership berhasil memfasilitasi lokakarya yang melibatkan lebih dari 20 K/L nasional dan penyintas TBC. Hasil dari pertemuan ini adalah komunikasi yang menjadi landasan strategi dan intervensi pelibatan multisektor dalam Strategi Nasional Penanggulangan TBC untuk 2020-2024 di Indonesia.



eliminasi TBC 2030 pada Presiden RI dengan pelibatan multisektor melalui kepemimpinan Pemerintah Pusat serta peran krusial Kepala Daerah. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara, Menteri Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dewan Pembina STPI menerangkan pentingnya Peraturan Presiden tentang TBC untuk mengakhiri penyakit menular yang paling membebani kelompok usia produktif, terutama dalam situasi globalisasi dan meningkatnya konektivitas antar daerah. Menyadari besarnya permasalahan TBC, Presiden menyampaikan komitmen untuk mengatasi persoalan dimulai dari wilayah dengan beban TBC terbesar.

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI SINERGI MULTISEKTOR UNTUK MENGAKHIRI TUBERKULOSIS

Menindaklanjuti United Nations High Level Meeting on Tuberculosis 2018, pada 10 Desember 2019, STPI dan Kemenkes RI didukung oleh Stop TB Partnership berhasil mendorong Pemerintah 2020-2024, diwakili Menteri Kesehatan RI, untuk mendeklarasikan komitmen nasional terhadap eliminasi TBC melalui pelibatan multisektor. Upaya ini dilakukan untuk mendorong visibilitas isu TBC dalam agenda politik dan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.



AUDIENSI, DUKUNGAN TEKNIS KEPADA ANGGOTA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI IX DPR RI

Sejak 9 Agustus 2019 setelah Gala Dinner, STPI aktif menjadi focal point untuk mendorong pelibatan anggota legislatif Indonesia dalam upaya penanggulangan TBC. Saat Gala Dinner. Penjajakan hubungan dengan beberapa anggota Komisi IX DPR RI dalam upaya penanggulangan TBC dimulai sebelum pergantian anggota untuk mendorong pembentukan Kaukus TBC Nasional yang bersifat lintas komisi dan non-partisan. Di tahun 2019, dua orang anggota Komisi IX bergabung dalam jaringan parlemen sedunia yang diorganisir GTBC. Pada tahun 2019 STPI memberikan dukungan teknis kepada Putih Sari, dari Fraksi Gerindra terlibat

di WHO End TB Summit dan Workshop TB Legislation sebagai side-events The Union Conference, serta kegiatan Temu Media tentang TBC yang dilaksanakan 'Aisyiyah. Pada 3 Desember 2019, STPI diterima untuk Rapat Dengar Pendapat bersama seluruh Komisi IX untuk menyampaikan urgensi dan peran legislatif untuk TBC.



LOKAKARYA PERAN LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN TBC DI LOMBOK BARAT

Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lokakarya peran lintas sektor untuk mendorong percepatan pencegahan dan pengendalian TB di Kab. Lombok Barat. Lokakarya ini hasil kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan komunitas TB di Lombok Barat. Kegiatan

ini diselenggarakan pada 26 Agustus 2019 dengan jumlah peserta 31 orang, yang terdiri dari 21 laki-laki dan 10 perempuan. Peserta kegiatan lokakarya merupakan perwakilan dari pemerintah dan swasta, organisasi profesi dan 19 organisasi berbasis komunitas. Hasil dari kegiatan lokakarya ini antara lain: (1) data kuantitatif dan kualitatif mengenai situasi TBC pada tingkat layanan, program dan komunitas di Kabupaten Lombok Barat (2) rencana pembentukan wadah kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan pengendalian TBC (3) pemetaan peran organisasi komunitas dalam pencegahan dan pengendalian TBC;



PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN TBC PPCP LOMBOK BARAT

Stop TB Partnership Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah

Stop TB Partnership Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah menginisiasi terbentuknya forum kemitraan TBC PPCP yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan komunitas. Pembentukan forum ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang difasilitasi oleh STPI sebelumnya, yaitu lokakarya peran lintas sektor, audiensi bersama pemimpin daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta pertemuan pra forum yang melibatkan semua calon anggota forum guna secara bersama membahas dan menyepakati konsep dan tata kelola forum.

Forum kemitraan TBC secara resmi berdiri pada 3 Desember 2019 diketuai oleh Sekretris Daerah Kabupaten Lombok Barat, dengan tiga unsur anggota forum yaitu pemerintah, swasta dan komunitas. Unsur pemerintah terdiri dari sejumlah OPD terkait di Kabupaten ini, yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama dan DP3AP2KB serta sejumlah layanan

kesehatan primer. Unsur swasta terdiri dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan perusahaan air minum lokal setempat. Sedangkan unsur komunitas diisi oleh LKNU, Nasyyatul Aisyiyah, Muslimat NW, GP Ansor, Coin Foundation, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna Kabupaten, IDI Lombok Barat dan IBI Lombok Barat.

Salah satu tujuan utama dari Forum ini adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, pihak swasta dan elemen masyarakat dalam menjalankan upaya pencegahan dan pengendalian TBC di daerah. Melalui forum ini, telah terdapat peran OPD diluar kesehatan yang telah dipetakan secara bersama. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan meningkatkan pengetahuan mengenai TBC pada peserta didik dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial dapat memasukkan modul terkait TBC dalam kegiatan *family development session*.

PENGUATAN KOMUNITAS PESANTREN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TBC DI SUMENEP

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menggalakkan pencegahan dan pengendalian TBC pada populasi berisiko, STPI telah bekerjasama dengan dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Annuqayah dan Al Karimiyah di Kabupaten Sumenep dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC pada lingkup pesantren.

Pemilihan pesantren sebagai bagian penting dari strategi eliminasi TBC dikarenakan pesantren yang padat penghuni dan tingkat kesadaran kebersihan diri dan lingkungan yang masih rendah menjadikan pesantren memiliki risiko tinggi untuk penularan TBC.

Upaya penguatan kapasitas pesantren dilakukan selama bulan Juli 2019 dalam 2 bentuk; (1) pelatihan TBC bagi para santri husada, sehingga mampu secara aktif dan mandiri merencanakan dan menerapkan

upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pendampingan pasien TBC yang berasal dari lingkup pesantren; (2) Sebagai bagian dari kegiatan deteksi dini, para santri husada melalui pendampingan STPI dan puskesmas setempat melakukan skrining gejala TBC kepada 10.033 masyarakat pesantren. Dari hasil skrining gejala tersebut terdapat 7 orang yang terkonfirmasi positif TBC dan sedang dalam pengobatan didampingi oleh santri yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak Puskesmas setempat.

Adapun sasaran skrining adalah penghuni pesantren Annuqayah, masyarakat Sawah Jarin dan kelompok wanita tani At-Thayyibah di Guluk-Guluk, pesantren Sumber Payung dan pesantren Al-Karimiyyah. Skrining dilakukan oleh kader dengan kunjungan ke kamar santri atau dilakukan per pondok. Skrining diawali dengan sosialisasi TBC yang dilakukan oleh santri atau petugas dari PKM. Selanjutnya santri menjawab pertanyaan-pertanyaan "Apakah anda mengalami gejala TBC". Setiap jawaban memiliki nilai. Jika nilainya ≥ 3 akan dikirim untuk pemeriksaan dahak atau konsultasi ke dokter dan jika < 3 akan diberikan penyuluhan etika batuk.



PELATIHAN MANAJEMEN POSKESTREN DAN KADER POSKESTREN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kesehatan institusi pesantren, STPI memfasilitasi kegiatan pelatihan manajemen Poskestren pada 18-21 September 2019 dengan jumlah peserta 19 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 9 perempuan. Materi dari pelatihan manajemen kesehatan pesantren antara lain: (1) peran dan fungsi Poskestren (2) mengorganisir Poskestren (3) Pencatatan dan pelaporan.

Selain pelatihan manajemen poskestren, STPI juga menyelenggarakan pelatihan kader Poskestren dengan harapan poskestren memiliki sumber daya manusia yang cukup baik untuk terlibat mengembangkan poskestren.

Pelatihan kader poskestren diselenggarakan pada 23-24 September 2019 diikuti 41 peserta yang terdiri dari 16 peserta laki-laki dan 25 peserta perempuan. Materi pelatihan kader poskestren antara lain: (1) peran dan tugas kader poskestren (2) survey mawas diri (3) PHBS

PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TBC DI SUMENEP

Pada 25 – 26 November 2019, Yayasan STPI memfasilitasi Pertemuan koordinasi lintas sektor di Kabupaten Sumenep. Pertemuan koordinasi ini dilakukan dalam bentuk lokakarya lintas sektor untuk mengidentifikasi permasalahan dan peran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian TBC.

Pertemuan ini dihadiri 37 peserta yang terdiri dari 13 Perempuan dan 24 Laki-laki. Adapun peserta pertemuan koordinasi ini antara lain: BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Dunia Usaha (Ophir Energy Indonesia, Bank Jatim, dan Bank BPRS Bakti Sumenep), fasilitas kesehatan swasta (Dokter Praktem Mandiri, Laboratorium Fortuna, RSUD Sumekar, RSI Garam Kalianget, RSIA Estho Ebhu) dan Komunitas (Gabungan organisasi wanita Kab. Sumenep, 'Aisyiyah, Muslimat NU, LKNU, Lakpesdam, Yayasan Muh. Khasim, LKC Dompot Dhuafa, IDI, Fatayat NU). Pertemuan ini menghasilkan komitmen lintas sektor untuk selanjutnya membentuk forum kemitraan TBC yang diharapkan mampu menjadi wadah kerjasama pencegahan dan pengendalian TBC dari beragam pemangku kepentingan di Sumenep.



OVERVIEW KEGIATAN 2019

KOMUNIKASI PUBLIK

KUNJUNGAN MEDIA

Pada bulan Februari 2019, STPI melakukan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV dan Berita Satu TV untuk menyampaikan peran media untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya TBC dan mendorong kebijakan publik yang dapat melindungi kesehatan masyarakat terdampak TBC. Pada Hari TBC Sedunia 2019, STPI mendukung Kompas TV untuk konten 2 liputan terkait TBC dan Berita Satu TV untuk 2 acara, termasuk Talk Show bersama salah satu Dewan Penasihat.

PENGUATAN KAPASITAS JURNALIS

Pada Maret - Mei 2019, STPI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta untuk melatih 27 jurnalis untuk meliput dampak sosioekonomi dari masalah TBC, memberikan fellowship untuk produksi 7 liputan di media nasional (TV/Majalah/Koran/Online), dan kompetisi karya jurnalistik untuk jurnalis se-Indonesia dengan 3 pemenang. Kegiatan ini berhasil mempublikasikan perspektif baru dan mendokumentasikan pengalaman masyarakat terdampak TBC.

MENINGKATKAN KESADARAN PUBLIK MELALUI PUBLIKASI STPI

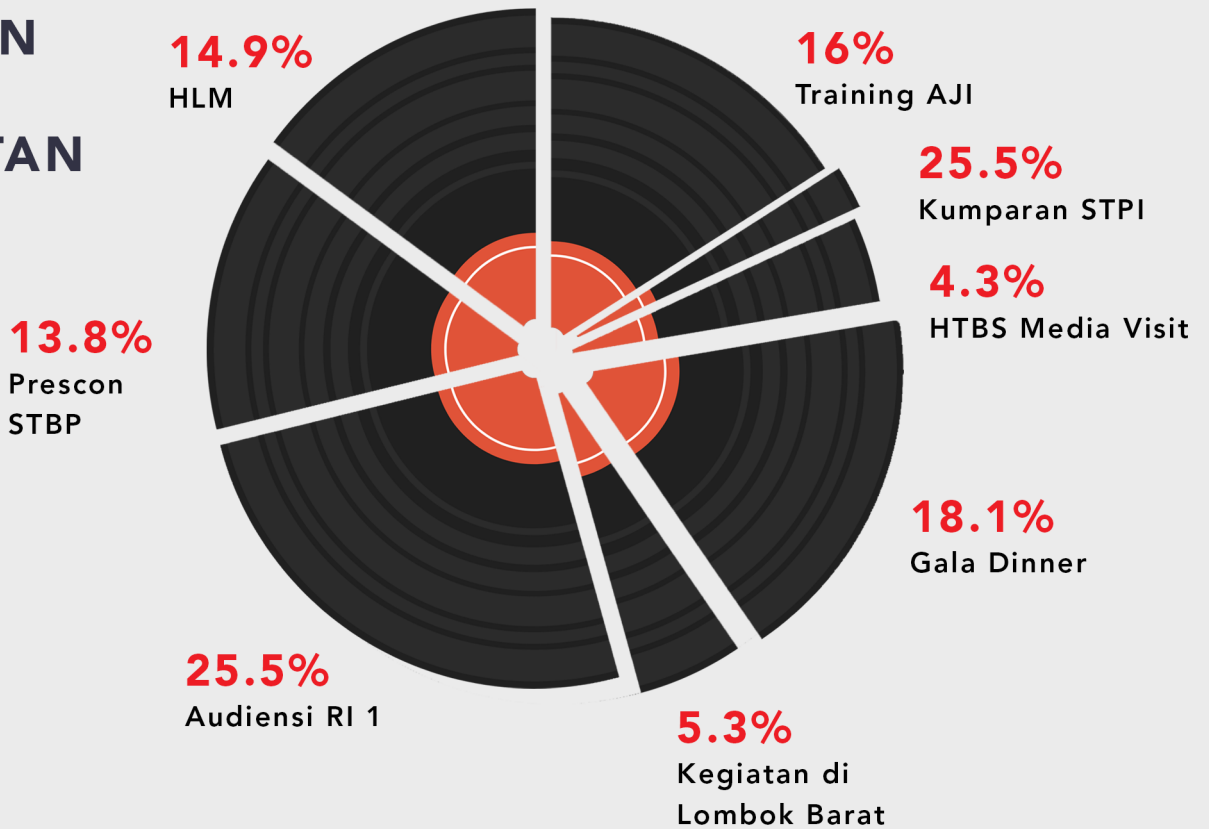
Semua produk komunikasi STPI berdasar pada pesan kunci bahwa TBC adalah permasalahan semua pihak. Setiap hari STPI mengunggah konten di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk informasi tentang penanggulangan TBC dalam bentuk audiovisual. Media sosial menjadi 'wajah' terdepan brand STPI sebagai insitusi yang terpercaya dan kredibel dalam menyampaikan situasi atau perkembangan program TBC di Indonesia maupun pendapat STPI.

STPI mengunggah artikel di website dan membuat newsletter per semester tentang kegiatan organisasi atau mitra lain yang tergabung dalam forum setiap bulan. Selain itu, STPI juga memiliki akun Kumparan untuk mempublikasikan kisah-kisah pasien atau kegiatan puskesmas.

Setiap kegiatan STPI seperti Gala Dinner, audiensi ke Presiden, dan pertemuan tingkat tinggi diikuti dengan menyebarkan siaran pers. STPI juga mempublikasikan opini tentang TBC dan pengendalian tembakau di pada Hari Tembakau Sedunia 2019.

CAPAIAN STPI

PROPORSI LIPUTAN MEDIA KEGIATAN STPI



POST FOLLOWERS IMPRESSIONS ENGAGEMENT

	POST	FOLLOWERS	IMPRESSIONS	ENGAGEMENT
	182	229	80.200	1.525
	235	1.870	297.638	16.942
	317	4.016	104.989	1.103.816

SOSIAL MEDIA

@stoptbindonesia



MANAJEMEN ORGANISASI

Sebagai bagian dari upaya memperkuat manajemen organisasi, Stop TB Partnership Indonesia telah melakukan beberapa upaya strategis selama 2019 antara lain:

- (1) rekrutmen staff organisasi
- (2) penyusunan standar kerja organisasi dan
- (3) mengembangkan jejaring pendanaan organisasi.

REKRUTMEN STAF

STPI telah merekrut 9 orang dengan posisi yang beragam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kerja organisasi. Ragam posisi seperti berikut ini:



MENERBITKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Yayasan STPI telah menyusun 4 buah SOP dengan tujuan memudahkan pelaksanaan kerja. SOP yang berisi ini berisikan tahapan dan urutan pekerjaan yang akan menuntun para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya SOP, kinerja pegawai bisa lebih terarah dan optimal. Beberapa SOP itu, antara lain:

- (1) Peraturan Administrasi Kepegawaian Yayasan,
- (2) Perjalanan dinas dan pertanggungjawaban uang muka
- (3) SOP Keuangan dan Unit Cost 2019
- (4) Skala gaji staff dan konsultan tahun 2019.

PENDANAAN JARINGAN MITRA

1. Stop TB Partnership

Stop TB Partnership

"Advancing TB Agent to National Level Beyond UN HLM"

2.



PT. Aventis (Sanofi)

"Lokakarya Peningkatan Cakupan Pencegahan dan Pengobatan Infeksi Tuberkulosis"

3.



USAID TBPS

"Lokakarya Penguatan Peran Multi Sektor Nasional Mengakhiri Tuberkulosis"

ALOKASI ANGGARAN

Selama kurun 2019 total pembiayaan program dan operasional berjumlah Rp. 2.289.057.408 dengan komposisi Rp. 1.214.994.082 untuk belanja program dan Rp. 1.074.063.326 untuk belanja operasional.

Biaya aktual untuk program per departemen, sebagian besar digunakan untuk departemen komunikasi dan advokasi (53%), pilot project di Kab. Sumenep dan Kab. Lombok Barat (31%) dan pengeluaran terendah dari Departemen Forum Kemitraan (2%).

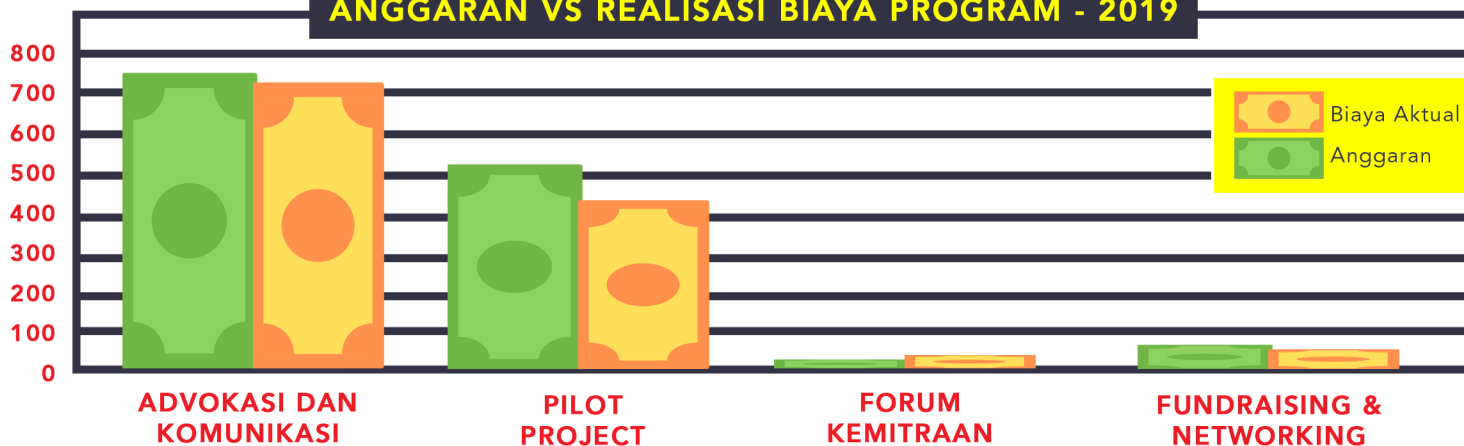
Berikut secara lengkap belanja Yayasan STPI selama 2019:

ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM - 2019

DEPARTEMEN	ANGGARAN	BIAYA AKTUAL	% REALISASI ANGGARAN	% BIAYA TERHADAP TOTAL BIAYA AKTUAL
Advokasi dan Komunikasi	736.867.815	709.621.964	53%	58%
Pilot Project	501.564.000	412.828.832	31%	34%
Forum Kemitraan	21.710.000	32.106.486	2%	3%
Fundraising and Networking	70.690.800	60.436.800	5%	5%
Total Program Cost	1.330.832.615	1.214.994.082	91%	100%

Total Operational Cost	1.061.945.210	1.074.063.326	101%	
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	--

ANGGARAN VS REALISASI BIAYA PROGRAM - 2019



TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

HARMONISASI MISI ORGANISASI DAN AGENDA PEMERINTAH SECARA BERMAKNA UNTUK MEMBERI DAMPAK PADA PROGRAM

Berbeda dari acara-acara sebelumnya ketika STPI sebatas berkoordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan, untuk dua kegiatan pada Desember 2019 sekretariat STPI berinisiatif untuk berbagi peran dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Subdirektorat Tuberkulosis, sejak September 2019. STPI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk penyelenggaraan Lokakarya Penguatan Peran Multisektor Nasional Untuk Mengakhiri Tuberkulosis dan Pertemuan Tingkat Tinggi Sinergi Multisektor Untuk Mengakhiri Tuberkulosis. Proses ini bersifat partisipatif dengan umpan balik dari STPI maupun Kementerian Kesehatan sehingga harmonisasi pandangan dan kegiatan-kegiatan terkait kedua acara tersebut dapat berjalan lancar.

Setiap tahapan kedua kegiatan tersebut dilakukan STPI bersama Subdirektorat Tuberkulosis dengan pembagian tanggung jawab dimulai dari konsep, perencanaan, koordinasi lintas sektor, mengirim undangan, administrasi, penyelenggaraan acara, hingga akhir pelaksanaan. Pengalaman tersebut bermakna karena kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keterlibatan multisektor, sesuai misi organisasi, dapat dipastikan memiliki dampak dalam Pemerintahan. Dalam kedua kegiatan tersebut, STPI juga bekerjasama dengan lintas program di Kementerian Kesehatan seperti Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Direktorat Jenderal P2PML, dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Rekomendasi untuk selanjutnya, sebaiknya kegiatan-kegiatan strategis lain yang ingin dilakukan oleh STPI perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan Pemerintah untuk menyelaraskan pandangan dan mengharmonisasikan tujuan. Dalam hal ini Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil adalah mitra pelaksana yang setara dan bekerja dengan prinsip saling melengkapi. Pada situasi dan untuk tujuan tertentu, advokasi dari masyarakat sipil akan lebih efektif melalui kolaborasi daripada konfrontasi sehingga meningkatkan kepercayaan dalam mendorong perubahan-perubahan paradigma baru dalam program TBC.

TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

STRATEGI INTERVENSI PENGENDALIAN TBC DI PESANTREN

Pesantren sebagai salah satu entitas yang unik dalam pendidikan di Indonesia dengan ciri khas model kurikulum dan metode pendidikan yang spesifik. Pesantren juga seringkali dicirikan sebagai komunitas yang kumuh dengan kesehatan lingkungan yang kurang bagus. Yayasan STPI mengembangkan program pengendalian TBC di pesantren dengan melakukan penguatan pada pengetahuan dan keterampilan TBC pada santri dan kader pesantren. Strategi ini cukup efektif dan mampu mendorong pesantren melakukan gerakan bersama dalam pencegahan TBC di ponpes. Meningkatnya pengetahuan santri untuk selalu waspada gejala TBC dan penguatan komunikasi dan koordinasi antara pengurus ponpes dengan puskesmas berkontribusi pada perubahan perilaku pesantren dalam pencegahan dan pengendalian TBC.

Kedepannya, strategi penguatan pengetahuan santri ditopang oleh koordinasi dan komunikasi efektif antara pimpinan pesantren dengan layanan kesehatan masyarakat menjadi pola mempengaruhi kebijakan dilingkungan komunitas pesantren.



BEST PRACTICE



Best Practice

CERITA PERUBAHAN NASIONAL DAN DAERAH

ILYASI: KADER TBC PESANTREN ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP

STRATEGI INTERVENSI PENGENDALIAN TBC DI PESANTREN

Ilyasi, begitu biasa dipanggil, aktivitas hariannya menjadi kader TB dan Ketua Poskestren Pondok Lubangsa pesantren Annuqayah. Sebagai kader TBC, belum banyak pengetahuan tentang pencegahan dan pengendalian TBC yang dimiliki oleh Ilyasi. Bahkan belum ada yang dikerjakan secara signifikan dalam melakukan promosi kesehatan TBC di pesantren. Dalam satu kesempatan dia mengungkapkan: selama menjadi kader TBC di pesantren, ia tidak memiliki ilmu tentang TBC sehingga ada rasa enggan untuk menyebarluaskan informasi tentang TBC.

Kini rasa enggan dan canggung itu, sedikit demi sedikit terkikis dan berbuah keberanian untuk menyebarluaskan informasi TBC ke

pesantren dan masyarakat. Pelatihan kader TBC yang diselenggarakan Yayasan STPI pada pertengahan November 2019 telah memberikan pengetahuan dan pemahaman baru dan komprehensif tentang TBC, mulai dari pengenalan tentang TBC sampai pada pencegahan dan pengendalian TBC.

Bekal pengetahuan dan pemahaman TBC yang lebih baik, telah membawa Ilyasi untuk mengambil peran lebih besar dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Sumenep. Di pundak Ilyasi, peran koordinasi kader TBC dengan lembaga di luar pesantren disematkan, pun juga persebaran informasi TBC pada seluruh santri pesantren Annuqayah.

“Program yang dilaksanakan oleh STPI membawa manfaat besar, khususnya untuk kader Poskestren dan kader TBC. Pemahaman kami tentang TBC dan PHBS meningkat dan sangat membantu saat penyuluhan”,

ILYASI

KESAN TERHADAP PROGRAM YAYASAN STPI

Komitmen besar Ilyasi juga ditunjukkannya di saat libur pesantren, Ilyasi telah membantu PKM Rubaru untuk penemuan kasus. Jangkauannya memang masih sedikit, tetapi hal tersebut menunjukkan jika Ilyasi bertanggungjawab dengan pengetahuan yang didapatnya. Salah satu cerita menariknya, Ilyasi berhasil

membujuk salah satu pasien TBC yang tidak mau berobat untuk memulai pengobatannya. Ilyasi berharap kedepannya, pelayanan TBC di daerah akan lebih maksimal sehingga eliminasi TBC 2030 dapat tercapai.

ADA ANGGARAN PROGRAM TBC DALAM ANGGARAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

*“Setelah menjadi anggota forum saya lebih paham lagi bahwa **TBC** adalah penyakit yang berbahaya tapi bisa di cegah dan diobati, masyarakat perlu memahami informasi yang benar mengenai TBC,”*

BAIQ HASRIANI,

**ANGGOTA FORUM KEMITRAAN TBC KAB. LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB LOMBOK BARAT**

Selama bulan Desember 2019, STPI telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota forum kemitraan TBC dalam bentuk pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian TBC dan lokakarya pengembangan strategi eliminasi TBC di Kabupaten Lombok Barat.

Hasil dari intervensi program STPI di Kab Lombok Barat telah meningkatkan kesadaran anggota

forum kemitraan TBC untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya ditunjukkan oleh Ibu Baiq Hasriani, sebagai salah satu anggota forum kemitraan TBC Kab Lombok Barat.

Sebagai Kepala Bidang Penguatan Kelembagan Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Lombok Barat, Ibu Hasriani berusaha mengadvokasi program

pengecahan dan pengendalian TBC untuk masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa dan kelurahan di Lombok Barat.

Dalam memperkuat advokasinya, Ibu Hasriani menggunakan beberapa cara; pertama, Dalam setiap kesempatan penguatan kapasitas desa, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menjelaskan tentang penyakit TBC, membawa mantan pasien TBC untuk menceritakan pengalamannya ketika terinfeksi dan selama menjalani pengobatan. Kemudian melakukan penguatan kapasitas tim penggerak PKK untuk terlibat dalam pencegahan dan pengendalian TBC dan melakukan koordinasi dengan puskesmas

setempat untuk mendapatkan data pasien TBC di desa, hal ini penting untuk memperkuat advokasi ke pemerintah desa.

Setelah mendapatkan penguatan kapasitas dan mengumpulkan data pasien TBC di desa, tim penggerak PKK hadir dalam pertemuan penyusunan RKPdes (Rencana Kerja Desa) 2020 dan menjelaskan pentingnya RKPdes menganggarkan kegiatan TBC di desa. Pada pertemuan penyusunan RKPdes ini DPMD bersama dengan Tim Penggerak PKK dan juga puskesmas Kembali mengajak mantan pasien TBC untuk memperkuat advokasi ke pemerintah desa.

“Saya sampai bawa mantan pasien TBC yang juga merupakan pengurus PKK dalam kegiatan penguatan kapasitas dan penyusunan RKPDes agar masyarakat lebih mengerti mengenai TBC, sehingga ada perhatian khusus untuk masalah ini di Desa”,

- IBU BAIQ HASRIANI



Penyampaian Informasi mengenai TBC dengan melibatkan mantan pasien TBC pada Kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Penggerak PKK



Contoh Kegiatan TBC yang dianggarkan pada RKPDes 2020 menggunakan dana desa



Penyampaian Informasi mengenai TBC dengan melibatkan mantan pasien TBC pada Kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Penggerak PKK

Hasil dari advokasi ini terdapat 9 Desa yang memasukkan kegiatan TBC kedalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) 2020, yaitu Lingsar, Selat, Suranadi, Karang Bayan, Telagawaru, Gegelang, Giri Sasak, Sesela dan Gontoron. Kisaran dana untuk kegiatan TBC 3,5 hingga 14 juta rupiah yang akan digunakan untuk penyuluhan TBC

pada masyarakat Desa dan dikelola oleh tim penggerak PKK. Kegiatan penyuluhan terkait TBC menjadi langkah awal yang pilih karena masih banyaknya informasi yang salah atau mitos mengenai TBC ditengah masyarakat yang menghambat pasien untuk berobat karena malu ataupun ketidaktahuan akan penyakit TBC.

PESANTREN SIAGA TBC



Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, bukan karena eksistensinya yang sudah sangat lama, tetapi karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. C. Geertz menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Madura, karena di Jawa dan Madura sangat banyak pondok-pondok yang didirikan, baik pondok pesantren yang santriwan dan santriwatinya sedikit bahkan santri yang sudah sangat banyak.

Bagi masyarakat Madura, pesantren merupakan tempat yang paling cocok untuk memperdalam ilmu agama. Tidak heran jika pesantren menjadi primadona dalam membangun keilmuan dan moral masyarakat. Sampai saat ini, pesantren semakin menjamur di Madura, tak pelak, jika ada sebagian orang menyebut Madura sebagai 'serambi Madinah'.

Pesantren An-nuqayyah dan al karimiyah merupakan dua pesantren tradisonal di Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang memiliki pengaruh social keagamaan cukup besar terhadap masyarakat Madura dan sekitarnya.

Pesantren Annuqayah memiliki santri 6.727 orang dan pesantren al karimiyah memiliki santri 1.500 orang. Seperti hal nya banyak pesantren tradisional lainnya, santri pada pesantren annuqayah dan al karimiyah menempati kamar yang diisi 20 – 40 orang pada setiap kamarnya dengan tikar sebagai alas tidur.

Padatnya jumlah penghuni pesantren, tentu berpengaruh pada tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan dan penghuninya, ditambah dengan aktivitas santri yang cukup padat, mengurangi waktu santri untuk membersihkan kamar dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data dari pos kesehatan pesantren (POSKESTREN), beberapa penyakit yang dominan menjangkiti santri pesantren antara lain penyakit scabies, Demam Berdarah Dengue (DBD), cacar, tipus dan TBC.

Selama ini POSKESTREN Annuqayah dan Alkarimiyah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan kesehatan santri dan lingkungan pesantren. Namun demikian, peran ideal POSKESTREN belum bisa dijalankan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no 1 tahun 2013, yang mengamankan POSKESTREN sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi promotif, preventif, rehabilitatif (memelihara kesehatan, mencegah, pemulihan kesehatan) dan kuratif (pengobatan).

Kegiatan utama yang dilakukan POSKESTREN lebih banyak bersifat kuratif atau pengobatan, sedikit sekali upaya promosi dan pencegahan. Sumberdaya manusia

yang menopang POSKESTREN, 4 perawat untuk pesantren Annuqayah dan 2 perawat untuk pesantren Al Karimiyah tanpa kader pesantren yang ikut terlibat dalam pengelolaan POSKESTREN.

Meningkatkan peran strategis POSKESTREN sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar pesantren, Yayasan STPI bekerjasama dengan pengasuh pesantren annuqayah dan alkarimiyah memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola POSKESTREN.

Beberapa intervensi kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan STPI selama Nopember-Desember 2019 antara lain: pelatihan kader TBC, penyuluhan dan skrining gejala TBC, pelatihan manajemen POSKESTREN, dan pelatihan kader POSKESTREN.

Intervensi kegiatan Yayasan STPI telah memberikan perubahan signifikan pada pengelola POSKESTREN. Jumlah kader terlatih TBC bertambah secara signifikan menjadi 41 kader dengan peran membantu pengelolaan POSKESTREN. Meningkatnya pengetahuan kader TBC, menjadikan kader sebagai sumber pengetahuan tentang TBC di lingkungan pesantren.

Persepsi santri tentang penyakit TBC berubah total dari anggapan sebagai hanya batuk dan cekek (penyakit mistik) menjadi persepsi rasional sebagai penyakit yang disebabkan bakteri dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang teratur.

Intervensi program dari STPI juga memberikan suntikan keberanian kader TBC untuk melakukan replikasi kegiatan kampanye TBC di pesantren yang lainnya. Kegiatan replikasi kader TBC pesantren Annuqayah dilakukan di pesantren sumber payung, kader TBC melakukan penyuluhan, edukasi dan skrining TBC di pesantren sumber payung.

POSKESTREN juga merubah diri dengan melakukan pengembangan ragam kegiatan yang meliputi survei mawas, penambahan jumlah perawat dan shift jam kerja mulai diberlakukan, POSKESTREN terbuka 24 jam, dan layanan Home Care di pesantren.



“Program yang dilaksanakan oleh STPI membawa manfaat besar, khususnya untuk kader Poskestren dan kader TBC. Pemahaman kami tentang TBC dan PHBS meningkat dan sangat membantu saat penyuluhan”

UJAR SALAH SATU KADER TBC PESANTREN ANNUQAYAH

DIFASILITASI STPI, LOMBOK BARAT KINI MILIKI FORUM KEMITRAAN TBC

Melalui Peraturan Bupati No 25 tahun 2018, Kabupaten Lombok Barat telah memiliki rencana aksi daerah (RAD) untuk pencegahan dan pengendalian TBC. Salah satu strategi yang tertulis dalam RAD untuk mempercepat eliminasi TBC adalah meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian TBC. Namun demikian, satu tahun berjalan sejak diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut, peran kolaboratif dan keterlibatan lintas sektor untuk mendorong penguatan dan percepatan eliminasi TBC belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Lemahnya peran kolaboratif dan keterlibatan lintas sektor, sebagian

disebabkan karena tidak ada kelembagaan atau wadah untuk mempertemukan lintas sektor untuk berkoordinasi dan melakukan sinergi konsolidatif dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC di Kabupaten Lombok Barat.

Di fasilitasi STPI dan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, Pada 3 Desember 2019 Forum kemitraan TBC Kabupaten Lombok Barat didirikan dan diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, sekaligus menjadi Ketua forum kemitraan TBC Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya H.Taufiq, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat mengungkapkan :

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat meresmikan forum dan juga bertindak selaku ketua forum kemitraan TBC



“Forum akan berjalan dengan lebih baik, jika melibatkan unsur lain diluar OPD, forum ini dapat menjadi contoh untuk hal tersebut.

Selanjutnya forum harus mampu aktif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain terkait kemitraan lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Daerah”.



Anggota Forum Kemitraan TBC yang terdiri dari sektor Pemerintah, Swasta dan Komunitas

H. TAUFIQ, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Forum kemitraan TBC Kabupaten Lombok Barat beranggotakan unsur pemerintah (organisasi perangkat daerah), sektor industri (PT. Amman Mineral Nusa Tenggara), layanan kesehatan swasta dan organisasi komunitas dan profesi di Kabupaten Lombok Barat.

Memperkuat peran forum kemitraan TBC, STPI menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bertujuan

memperkuat kapasitas anggota forum, antara lain; Lokakarya peran lintas sektor dalam program TBC di Kabupaten Lombok Barat dan Pelatihan advokasi terhadap organisasi berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan peran advokasi guna mendukung penyelenggaraan program TBC yang berpusat pada pasien dan umpan balik penyelenggaraan program TBC.

INISIATIF PELIBATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Tuberkulosis (TBC) merupakan permasalahan lintas sektor yang membutuhkan gagasan dan solusi dari beragam pihak dan multidisiplin untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan populasi secara setara dan adil. Penyakit TBC berdampak pada kelompok usia produktif sehingga tidak hanya relevan bagi sektor kesehatan tetapi juga ketenagakerjaan serta populasi yang menjadi isu utama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada periode 2020-2024, telah dilantik 117 anggota legislatif perempuan di DPR RI termasuk drg. Putih Sari dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Karir politiknya dimulai pada usia 25 tahun ketika dilantik sebagai anggota DPR

RI pada 2009-2014. Sepanjang 2014-2019 Ia memimpin sebagai Wakil Ketua Komisi IX dan bekerja dalam berbagai Panitia Kerja (Panja) untuk berbagai isu seperti sistem jaminan kesehatan, ketenagakerjaan di sektor kesehatan, supervisi sirkulasi obat-obatan dan vaksin, dan kesehatan haji. Selain itu, drg. Putih Sari terlibat aktif dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keterlibatan beliau dalam isu TBC dimulai sejak September 2019 ketika Stop TB Partnership Indonesia bersama Global TB Caucus melakukan audiensi dengan drg. Putih Sari sebagai Wakil Ketua Komisi IX, dr. Suir Syam, dan dr. Soemaryati Aryoso.

“

Saya baru mengetahui bahwa Indonesia mendukung Deklarasi Politis pada sidang PBB tentang tuberkulosis. Artinya, Pemerintah harus berupaya mendiagnosis dan mengobati 3.4 juta penduduk yang terdampak TBC dan diantaranya 415.800 anak-anak serta 57.600 yang sakit TBC resistan obat. Saya sangat mendukung komitmen ini dan memastikan kita (Komisi IX DPR RI) bekerja sama dengan mitra kami, terutama Kementerian Kesehatan, untuk mencapainya.”

**DRG. PUTIH SARI,
KETIKA BERGABUNG DALAM JARINGAN PARLEMEN SEDUNIA/
GLOBAL TB CAUCUS PADA PERIODE KEDUANYA DI DPR RI**



drg. Putih Sari pada saat Lokakarya Penguatan Peran Multi-Sektor Nasional Mengakhiri Tuberkulosis

Upaya Stop TB Partnership Indonesia (STPI) melibatkan DPR RI dalam penanggulangan TBC secara resmi didukung oleh Subdirektorat Tuberkulosis dan Kementerian Kesehatan RI, WHO Indonesia, serta mitra-mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil dalam Forum Kemitraan TBC yang bertemu pada 25 September 2019, satu tahun pasca Sidang PBB tentang TBC/UN HLM TB. Dalam pertemuan ini diketahui bahwa dua anggota DPR lain yang sudah tidak aktif di Komisi IX pernah dilibatkan dalam pertemuan tentang TBC tetapi upaya ini tidak berkesinambungan karena belum ada focal point yang secara terus menerus menguatkan peran para anggota.

STPI berkomitmen untuk mendukung para

“Ketika menghadiri konferensi The Union dan bertemu penyintas TBC resistan obat, saya mendengar bagaimana mereka berjuang untuk sembuh dari penyakit yang pernah menghancurkan tidak hanya tubuh tetapi psikologis mereka. Dan, saya mengetahui bahwa TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, dengan sistem kesehatan yang kuat, dan bahwa seharusnya tidak ada orang yang perlu merasakan lagi hidupnya hancur akibat TBC.”

anggota DPR RI periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan Pemerintah dan masyarakat peduli terhadap penanggulangan TBC serta mengupayakan Kaukus TBC Nasional. Oleh sebab itu, sepanjang Oktober-Desember 2019, STPI memberikan dukungan teknis kepada Komisi IX DPR RI terutama bagi drg. Putih Sari sebagai narasumber dalam END TB Summit dan Lokakarya Legislatif di acara khusus pada The Union Conference ke-50, dalam Lokakarya Sinergi Multi-Sektor Mengakhiri Tuberkulosis bersama pemangku kebijakan Nasional, dan Temu Media yang diadakan oleh PR TB 'Aisyiyah.

Menurut drg. Putih Sari, “Organisasi Masyarakat Sipil dapat mendukung pertemuan dengan masyarakat dan para ahli untuk menyampaikan aspirasi serta isu-isu terbaru dalam penanggulangan TBC. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi ini dan membutuhkan pelibatan yang terus menerus agar TBC menjadi isu strategis di DPR RI”. Dengan presensi drg. Putih Sari sebagai anggota Global TB Caucus dan di DPR RI 2020-2024, pada 2 Desember 2019, permohonan audiesnsi STPI dapat diterima oleh Komisi IX DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan para anggota Komisi IX, STPI menyampaikan aspirasi untuk seluruh Komisi IX mendukung mengangkat tujuan eliminasi TBC sebagai isu nasional.

20
20

S T
P I